KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1001/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkomitmen untuk mempercepat upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, diperlukan adanya suatu Rencana Kerja sebagai acuan dalam Pembangunan Zona Integritas demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon, Dan Jayapura;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90

Integritas ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Kesatu	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1466/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2023;
Kedua	:	Menetapkan dan mengesahkan berlakunya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
Ketiga	:	Memerintahkan kepada setiap Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan sebaik-baiknya pada kelompok kerja masing-masing serta melaporkan setiap proses kemajuan dan kendala yang terjadi kepada saudari PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P., selaku Sekretaris Dokumen Kontrol Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1001/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2025
Tanggal: 20 Juli 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	Mensosialiasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Kesiapan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menjadi wilayah Zona Integritas	1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Penyampaian Kebijakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas. 3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui Website, Spanduk, Banner dan Radio.	100% 100% 100%	
2	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Manajemen Perubahan	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik.	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Menentukan aparat yang menjadi Tim Kerja. 2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100% 100%	
			Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 3. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100% 100% 100%	
			Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi. 3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi.	100% 100% 100%	

Perubahan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
			Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 2. Menunjuk sebagian hakim dan pegawai sebagai role model. 3. Meningkatkan pelayanan satu atap, dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara 4. Menetapkan agen perubahan dengan membuat aturan pelarangan adanya pertemuan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan pihak yang berperkara. 5. Melibatkan semua aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Pembangunan Zona Integritas.	100% 100% 100% 100% 100%	
3	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Tatalaksana	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menerapkan SOP secara konsisten 2. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.	100% 100%	
			E- Office	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelengaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi 2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIKEP, SIMAK BMN, dll) 3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.	100% 100% 100% 100%	
			Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Membuat brosur, audo visual, spanduk, dan Banner dalam	100% 100% 100%	

3. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
					membrikan informasi kepada publik 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang		
4	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100% 100% 100%	
			Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal	100% 100% 100%	
			Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi 2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 3. Mengikutkan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mendapatkan sertifikasi di bidang tugas masing-masing	100% 100% 100%	
			Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Menyesuaikan kinerja individu dengan Indikator kinerja	100% 100% 100%	

3. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
					individu level di atasnya 3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik 4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu		
			Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat absensi pegawai dengan Absensi Manual dan Absensi Online SIKEP diinput dalam Aplikasi OMDANAS 2. Membuat Surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar 3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari	100% 100% 100%	
			Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Memutakkhirkan data secara berkala pada SIKEP Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100%	
5	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan 2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja 3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala	100% 100% 100%	
			Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat dokumen perencanaan Yang berorientasi hasil 2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART 3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja 4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja	100% 100% 100% 100% 100%	
6	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Tata	1. Membuat kampanye publik (*public campaign*) tentang pengendalian gratifikasi	100% 100%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
	Penguatan Pengawasan	Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang		Usaha Negara Kupang	2. Menginplementasikan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang		
			Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	1. Membangun Pengendalian Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Melakukan Penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi 4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100% 100% 100% 100%	
			Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	100% 100% 100% 100%	
			Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Mengevaluasi penerapan *Whistle Blowing System* 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*	100% 100% 100%	
			Penanganan Benturan Kepentingasn	Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan 3. Menginplementasikan penanganan benturan kepentingan	100% 100% 100% 100% 100%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
					4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan		
7	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publikdi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Standar Pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100% 100% 100% 100%	
			Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik labih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika, dan *capacity building* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media 3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100% 100% 100% 100%	
			Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka 3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di	100% 100% 100%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
					Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang		
8	Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai Persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang bersih dan bebas KKN	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100%	
			Presentase penyelesaian TLHP	Terwujudnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Melakukan perhitungan atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	100%	
9	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100%	

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

dibidang ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.